



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2019



**BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pahlawan No.9 Semarang
Telepon 024-8311174 ext.340 Fax.024-8441013
biropemotdakerjasama@jatengprov.go.id
@biropemotdaks

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama menyusun Laporan Kinerja instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini merupakan laporan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Semoga LKjIP ini dapat mendorong peningkatan kinerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Semarang, 28 Februari 2019
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,
OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

MUHAMAD MASROFI, S.Sos,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196805171989081002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
C. Isu Strategis Organisasi.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis.....	5
B. Perjanjian Kinerja 2019.....	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	10
B. Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	30
B. Saran.....	30

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban yang memuat informasi kinerja dengan tolak ukur realisasi kinerja terhadap target dan perjanjian kinerja yang telah dibuat di awal tahun 2019.

Untuk mengoptimalkan koordinasi penyusunan kebijakan, pelaksanaan program dan fasilitasi administrasi pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum, penataan wilayah, pelaksanaan otonomi daerah dan kerjasama, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama menetapkan sasaran meningkatnya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama daerah melalui 4 (empat) Program yang terdiri atas 12 (dua belas) Kegiatan dengan total anggaran Rp8.500.000.000,00.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama menetapkan indikator dalam setiap sasaran sebagai alat ukur untuk merepresentasikan capaian kinerja guna mendukung rumusan tujuan yang hendak dicapai yang disajikan dalam bentuk penilaian capaian kinerja hasil pelaksanaan sasaran strategis pada tahun 2019 sebesar 104,5% (meningkat 7,82% dari tahun 2018 sebesar 96,68%) dalam kategori Sangat Baik.

Melalui LKjIP Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja tahun selanjutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

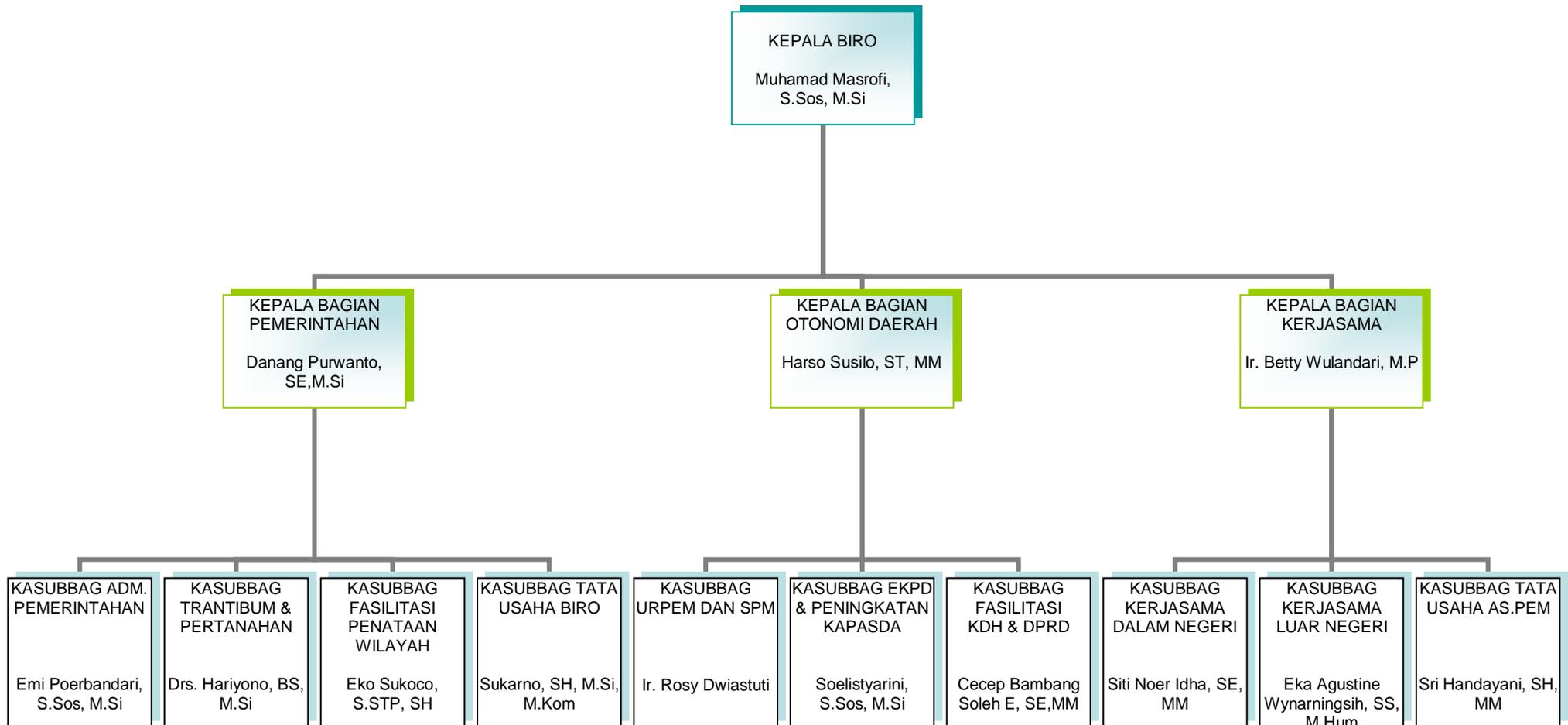
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas

dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan;
5. Pelaksanaan fasilitasi sekretariat perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
6. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pada bulan Desember Tahun 2019, sumber daya Aparatur Sipil Negara pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berjumlah 51 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Biro (Eselon II), 3 orang Kepala Bagian (Eselon III), 10 orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV) dan 37 orang Jabatan Fungsional Umum menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA



C. Isu Strategis Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama pada tahun 2019, terdapat aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil risiko yang telah teridentifikasi pada Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP-SPIP) Tahun 2019 yaitu :

1. Masih digunakannya indikator SPM dan tipe urusan LPPD dari aturan lama (UU 32 Tahun 2004) dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga diperlukan pengambilan kebijakan dalam evaluasi dan pelaporannya;
2. Perlunya penegasan batas daerah antar provinsi;
3. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) sehingga seluruh pelayanan perijinan berusaha perseorangan dan non perseorangan dilaksanakan satu pintu;
4. Masih adanya kerjasama dalam negeri yang tidak terealisasi dengan optimal dan kurangnya monitoring terhadap lembaga non pemerintah luar negeri yang menjalankan kegiatan di Jawa Tengah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1) RPJMD 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 untuk Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
RPJMD 2018-2023
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (<i>Policy Brief</i>) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang pemerintahan	%	85	100	100	100	100
Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
Persentase tertib administrasi pemerintahan	%	100	100	100	100	100
Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	%	100	100	100	100	100
Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	100
Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW DPRD	%	100	100	100	100	100

2) RENSTRA 2018-2023

Sesuai Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama adalah sebagai berikut :

Tabel II.2
RENSTRA 2018-2023
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah			Persentase Kebijakan yang Efektif	80	81	82	83	84
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	81	82	83	84
			Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	75	76	77	78	79
	Meningkatkannya Sinergitas Kebijakan Daerah		Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85	85	85	85	85
			Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	70	75	80	85	90
		Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Presentase Hasil Ringkas Kebijakan (<i>Policy Brief</i>) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	85	100	100	100	100
			Presentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
		Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (<i>Policy Brief</i>) Bidang Pemerintahan	1	1	1	1	1
		Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri	1	1	1	1	1
			Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	50	50	50	50	50
		Kegiatan Peningkatan Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri	Jumlah Dokumen rumusan kerjasama luar negeri	1	1	1	1	1

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
			Presentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas luar negeri	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100	100	100	100	100
			Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100	100	100	100	100
		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Presentase tertib administrasi pemerintahan	100	100	100	100	100
			Presentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	100	100	100	100	100
		Kegiatan administrasi penataan wilayah	Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun	1	1	1	1	1
			Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	1	1	1	1	1
			Jumlah dokumen penegasan batas daerah	2	2	2	2	2
		Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	1	1	1	1	1
		Kegiatan identifikasi ketentraman, ketertiban dan pertanahan terpadu	Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan	1	1	1	1	1
			Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa	1	1	1	1	1
		Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan	Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM	36	36	36	36	36

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
			Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	36	36	36	36	36
			Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	36	36	36	36	36
		Peningkatan Pelayanan Otonomi Daerah	Presentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100
			Presentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	100	100	100	100	100
		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah dan Daya Saing Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov Jateng dan Kab/Kota	13	13	13	13	13
			Jumlah dokumen hasil evaluasi kapasitas daerah kab/kota	35	1	1	1	35
		Kegiatan administrasi Kepala Daerah dan Proses PAW Anggota DPRD	Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan wakil KDH	5	21	21	7	4
			Jumlah dokumen fasilitasi PAW anggota DPRD	30	5	20	30	30
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	75	76	77	78	79
		Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Presentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	100	100	100	100	100
		Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12	12	12	12	12

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
		Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12	12	12	12	12
		Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan dan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12	12	12	12	12

3) Indikator Kinerja Utama 2018-2023

Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama menetapkan empat Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dokumen IKU Setda nomor 5, 6, 30, dan 31 (terlampir).

B. Perjanjian Kinerja 2019

Di tahun 2019, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama menjalankan 4 Program pendanaan dari APBD sejumlah Rp8.500.000.000,00 dengan 5 Indikator Kinerja dan 1 Program pendanaan dari APBN sejumlah Rp188.360.000,00. Untuk meningkatkan sinergitas kebijakan daerah terdapat 2 Indikator Kinerja yang menargetkan realisasi rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan sebesar 85% serta efektivitas kerjasama sebesar 70%. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah terdapat 2 indikator kinerja yang menargetkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan kabupaten/kota sebesar 100% serta tertib pelaksanaan otonomi daerah sebesar 100%. Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Tahun 2019 secara lengkap terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sampai dengan akhir tahun 2019, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Untuk memudahkan interpretasi pengukuran atas pencapaian kinerja dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel III.1
Interval Nilai Capaian Kinerja

NO.	NILAI	KETERANGAN
1.	90-100	Sangat Baik
2.	80-89	Baik
3.	50-79	Cukup Baik
4.	≤ 49	Kurang

Sesuai Renstra Tahun 2018-2023, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, memiliki tujuan **"Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah"**. Untuk mencapai tujuan tersebut, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Dan Kerjasama selaku bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki tiga sasaran yaitu :

- Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah
- Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama).

1. Target Dan Realisasi Tahun 2019

Sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan, ditetapkan sasaran dan indikator dengan target sebagai berikut :

Tabel III.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Tahun 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	1. Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85%
		2. Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	70%
	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3. Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100%
		4. Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	5. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum lingkup Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama	100%

Realisasi capaian per indikator sasaran sebagai berikut :

- a) Indikator Sasaran 1 : Persentase hasil rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan yang terealisasi.

Tabel III.3
Capaian Indikator Sasaran 1

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2019	Realisasi 2019	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2019 Atas Target Renstra
Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85%	100%	-	117% (tahunan)

Indikator ini ditunjang oleh Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan. Dengan penggunaan sumber daya keuangan sebesar 72,91%, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Dan Kerjasama dapat merealisasikan hasil rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan yang tertuang dalam *policy brief* sebesar 100% dari target 85% (tingkat capaian 117%) melalui disusunnya rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati/Walikota Kepada Camat, diprosesnya *review* atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan kebijakan *Online Single Submission*, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Izin Gangguan oleh Kementerian Dalam negeri. Berdasarkan hasil monitoring, sampai dengan akhir tahun 2019 Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses mensinergikan kewenangan perizinan dengan memperhatikan peraturan lain agar tidak bertentangan, memformulasikan kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat serta pemetaan bersama Dinas/Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- b) Indikator Sasaran 2 : Persentase kerja sama dalam negeri dan luar negeri yang efektif.

Tabel III.4
Capaian Indikator Sasaran 2

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2019	Realisasi 2019	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2019 Atas Target Renstra
Persentase kerja sama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	70%	71%	-	83%

Dengan pemanfaatan 98,66% sumber daya keuangan, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Dan Kerjasama dapat merealisasikan capaian indikator sasaran 2 sebesar 101% atau tercapai 71% dari target 70%. Efektivitas kerjasama keseluruhan dihitung dari persentase efektivitas kerja sama dalam dan luar negeri . Untuk kerja sama dalam negeri efektivitas diukur dari persentase Kesepakatan Bersama yang telah disusun Perjanjian Kerja Samanya. Dengan disusunnya Perjanjian Kerja Sama, maka pelaksanaan kerja sama dapat berjalan dengan efektif. Bagi kerja sama luar negeri yang tahapan proses penetapan dokumen kerja samanya lebih panjang, efektivitas kerjasama diukur dari persentase rumusan kerja sama yang ditetapkan menjadi dokumen kerja sama.

Dari 69 Kesepakatan Bersama, 29 telah memiliki Perjanjian Kerja Sama, sehingga memberikan daya ungkit sebesar 42% untuk efektivitas kerja sama dalam dan luar negeri. Daya ungkit sebesar 100% diberikan melalui rumusan kerja sama luar negeri telah ditetapkan dengan ditandatanganinya MoU perpanjangan *Sister Province* dengan Queensland-Australia untuk tahun 2019 sampai dengan tahun

2023. Rata-rata dari kedua jenis kerja sama inilah yang telah merealisasikan efektivitas kerja sama sebesar 71% dari target 70%.

Indikator Sasaran 2 tercapai melalui Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Daerah Dalam Negeri dan Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Pemda dengan Luar Negeri. Hasil kerja sama dalam negeri selama tahun 2019 antara lain :

- 1) Kerjasama Jawa-Bali dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama;
- 2) Kerjasama dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia;
- 3) Kerjasama kewilayahan antar Kabupaten Kota di Jawa Tengah;
- 4) Mendorong kesadaran masyarakat untuk taat pajak daerah yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 5) Memfasilitasi nelayan Jawa Tengah agar dapat memperluas wilayah penangkapan ikan ke daerah Kalimantan Tengah melalui Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang Perikanan Tangkap Dalam Kegiatan Andon Penangkapan Ikan;
- 6) Mewujudkan angkutan aglomerasi perkotaan Bus Rapid Transit Trans Jateng guna mendukung angkutan umum masal dengan tarif terjangkau melalui Perjanjian Kerja

Sama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang tentang Pengelolaan Bersama Sarana Dan Prasarana Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jawa Tengah Dan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang.

Gambar 2



Kerjasama Dalam Negeri

Untuk kerja sama luar negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalin kerja sama *sister province* dengan 4 negara yaitu (Queensland-Australia, Fujian-Republik Rakyat Tiongkok, Siem Reap-Kamboja dan Chung Cheongbuk-do – Korea). Pada tahun 2019 dilakukan perpanjangan MOU *sister province* dengan Pemerintah Negara Bagian Queensland Australia. Perpanjangan ini termasuk perluasan jenis kerjasama dengan ditandatanganinya kerja sama bisnis

properti dan infrastruktur serta kesehatan untuk membantu mewujudkan program unggulan Gubernur rumah sakit tanpa dinding.

Di bidang pendidikan, dilakukan pengiriman 6 Guru SMA/SMK ke Queensland bulan Juli 2019 untuk peningkatan kompetensi Bahasa Inggris. Di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata, diadakan Kontak bisnis antara PT. Pinako Rotari Permai dari Jawa Tengah dengan PT. Australis Leisure Pty. untuk produk mebel senilai USD150.000 sebanyak 3 container 20” setiap bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Di samping itu, Jawa Tengah mendapat potensi buyer Euclidean International Pty. yang tertarik bekerja sama mendesign hologram untuk ruangan dan kebutuhan kantor, Union Institute of Language Queensland yang tertarik bekerjasama mendesign laboratorium bahasa dan ruang baca mahasiswa menggunakan *custom product design*, serta kerjasama sektor kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan *Queensland University of Technology* dengan ruang lingkup kesehatan masyarakat, penguatan sistem informasi kesehatan, penguatan manajemen bencana dan manajemen pengelolaan limbah.

Pada tahun 2019, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Dan Kerjasama memfasilitasi 102 proses izin perjalanan dinas dan bukan dinas ke luar negeri bagi Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Anggota DPRD.

Gambar 3



Perpanjangan dan Penjajakan Kerja Sama Dengan Luar Negeri

Adanya efisiensi sebesar 1,34% atau sebesar Rp.36.731.140 pada penggunaan sumber daya anggaran yang menunjang Indikator Sasaran 2 terdiri dari efisiensi belanja sewa hotel, makan minum dan perjalanan dinas.

- c) Indikator Sasaran 3 : Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota

Tabel III.5
Capaian Indikator Sasaran 3

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2019	Realisasi 2019	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2019 Atas Target Renstra
Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100%	100%	-	100% (tahunan)

Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar 100%. Hal ini ditunjang oleh program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Kegiatan Administrasi Penataan Wilayah, Kegiatan Pembinaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan, serta Kegiatan Identifikasi Ketentraman, Ketertiban Dan Pertanahan Terpadu.

Efektifnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota terlihat dari terlaksananya amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 yaitu Gubernur sebagai fasilitator penegasan batas daerah yang direalisasikan dalam penegasan 4 segmen batas daerah per tahun serta terlaksananya amanat Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 terkait Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Pembakuan nama rupabumi Jawa Tengah telah dilakukan melalui aplikasi SAKTI (Sistem Akuisisi Data Toponimi Indonesia) dari Badan Informasi Geospasial.

Gambar 4

Nama Usur	Nama Gazetteer	Koordinat Utama	Koordinat Tambahan	Provinsi	Kabupaten / Kota	Kecamatan	Desa / Kelurahan
Pendidikan Dasar	SDN KARANGKEMIRI 02, GEDUNG	109°02'36.59" T 07°34'09.87" S		Jawa Tengah	Cilacap	Jerangkajene	Karangkemi
Pendidikan Dasar	SDN KARANGKEMIRI 01, GEDUNG	109°02'31.61" T 07°34'07.96" S		Jawa Tengah	Cilacap	Jerangkajene	Karangkemi
Pendidikan Dasar	SDN KARANGKEMIRI 01, GEDUNG	109°02'36.59" T 07°34'09.87" S		Jawa Tengah	Cilacap	Jerangkajene	Karangkemi
Pendidikan Dasar	SDN JAMBUSARI 03, GEDUNG	109°01'48.20" T 07°37'40.95" S		Jawa Tengah	Cilacap	Jerangkajene	Jambusari
Pendidikan Dasar	SDN KARANGKEMIRI 02, GEDUNG	109°02'36.59" T 07°34'09.87" S		Jawa Tengah	Cilacap	Jerangkajene	Karangkemi
Pendidikan Anak Usia Dini	Roudhotul Zuhri Peningihan, Gedung PKMD	109°00'22.87" T 07°35'12.82" S		Jawa Tengah	Cilacap	Maos	Peningihan
Pendidikan Keagamaan	Majelis NU Peningihan 01, Sekolah MI	109°00'37.17" T 07°35'18.83" S		Jawa Tengah	Cilacap	Maos	Peningihan
Pendidikan Keagamaan	Jatidhar Peningihan, Pondok Pesantren	109°00'13.99" T 07°35'01.08" S		Jawa Tengah	Cilacap	Maos	Peningihan
Pendidikan Dasar	Danawata Glempong, Gedung MI	109°00'46.01" T 07°34'53.41" S		Jawa Tengah	Cilacap	Maos	Glempong
Kantor Lurah	Kondan, Kantor Kelurahan	109°00'15.28" T 06°52'29.19" S		Jawa Tengah	Kota Tegal	Margadana	Kelurahan Kondan
Kantor Pemerintah Lainnya	BKD Kondan, Badan Kredit Desa (BKD) Kondan	109°00'22.90" T 06°52'46.92" S		Jawa Tengah	Kota Tegal	Margadana	Kelurahan Kondan
Kantor Pemerintah Lainnya	Kecamatan Margadana, Kantor Urusan Agama	109°00'01.00" T 06°52'24.02" S		Jawa Tengah	Kota Tegal	Margadana	Kelurahan Margadana
Pendidikan Dasar	Negeri 4 Karsana, SD	108°51'53.99" T 06°58'16.19" S		Jawa Tengah	Brebes	Karsana	Karsana
Arena Adrenalin dan Olah Raga	Nyamar Fitness, Pusat Kabupaten	108°52'45.79" T 06°55'46.11" S		Jawa Tengah	Brebes	Karsana	Jinggipura
Masjid	Al Hidayat, Musholla	108°51'57.09" T 06°58'16.79" S		Jawa Tengah	Brebes	Karsana	Karsana
Pendidikan Dasar	Kraton 1, Sekolah Dasar	109°07'31.15" T 06°52'00.54" S		Jawa Tengah	Kota Tegal	Tegal Barat	Kelurahan Kraton
Pendidikan Dasar	Miftahul Ulum, MI	109°06'30.22" T 06°52'34.40" S		Jawa Tengah	Kota Tegal	Tegal Barat	Kelurahan Peleusungan Kidul
Pendidikan Dasar	Kajambon 2, SD	109°08'30.28" T 06°52'25.33" S		Jawa Tengah	Kota Tegal	Tegal Timur	Kelurahan Kajambon
Kantor Lurah	Sekodowet 1, Sekodowet	109°41'33.12" T 06°55'49.02" S		Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Pekalongan Selatan	Kelurahan Sekodowet
Pendidikan Tinggi	LPIB, LPIB	109°06'11.00" T 06°52'27.34" S		Jawa Tengah	Kota Tegal	Tegal Timur	Kelurahan Manglukusuman
Kantor Lurah	Buayan Kradenan, Buayan Kradenan	109°39'14.48" T 06°56'45.31" S		Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Pekalongan Selatan	Kelurahan Buayan Kradenan
Kantor Lurah	Podosough, Podosough	109°39'52.94" T 06°53'40.90" S		Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Pekalongan Barat	Kelurahan Podosough
Perwakilan/Rekrutasi Partai	ALAM INDAH, PANTAI	109°06'33.81" T 06°50'32.36" S		Jawa Tengah	Kota Tegal	Tegal Timur	Kelurahan Mintaragen
Perwakilan/Semi/Suwaya/Olah Raga Lainnya	KOTA MINTARAGEN, HUTAN	109°06'48.08" T 06°50'54.06" S		Jawa Tengah	Kota Tegal	Tegal Timur	Kelurahan Mintaragen
Perwakilan/Semi/Suwaya/Olah Raga Lainnya	KOTA MINTARAGEN, HUTAN	109°06'48.08" T 06°50'54.06" S		Jawa Tengah	Kota Tegal	Tegal Timur	Kelurahan Mintaragen
Kantor Lurah	Kandang Panjang 1, Kandang Panjang	109°40'24.33" T 06°52'13.36" S		Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Pekalongan Utara	Kelurahan Kandang Panjang
Kantor Lurah	Panjang Baru, Panjang Baru	109°40'24.54" T 06°51'54.34" S		Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Pekalongan Utara	Kelurahan Panjang Baru

Pembakuan Nama Rupabumi
Dalam Sistem Akuisisi Data Toponimi Indonesia

Penataan batas daerah dilaksanakan melalui :

- Perapatan segmen batas Kabupaten Tegal dengan Kota Tegal
- Perapatan segmen batas Kabupaten Sragen dengan Kabupaten Karanganyar
- Pemeliharaan pilar batas Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Rembang
- Penegasan batas daerah Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat
- Penegasan batas daerah Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan Kabupaten Kuningan Jawa Barat
- Penegasan batas daerah Kabupaten Brebes Jawa Tengah dan Kabupaten Cirebon Jawa Barat
- Penegasan batas daerah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten
- Penegasan batas daerah Kabupaten Klaten Jawa Tengah dan Kabupaten Gunung Kidul D.I. Yogyakarta

- Penegasan batas daerah Kabupaten Klaten Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta

Gambar 5



Penegasan Batas Daerah

Penyusunan kode data wilayah administrasi pemerintahan dilaksanakan melalui pemutakhiran kode dan data wilayah dengan pencatatan desa, kelurahan, kecamatan,

kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk pemekaran kecamatan Pada tahun 2019 wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah meliputi 29 Kabupaten, 6 Kota, 576 Kecamatan, 7.809 Desa dan 753 Kelurahan. Hasil akhir berupa dokumen Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan merupakan bahan kebijakan pembagian dana alokasi utk daerah/desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Gambar 6



Dokumen Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp1.514.572.638,- dari alokasi anggaran senilai 1.536.299.000,- dengan efisiensi sebesar 1,41%.

d) Indikator Sasaran 4 : Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD

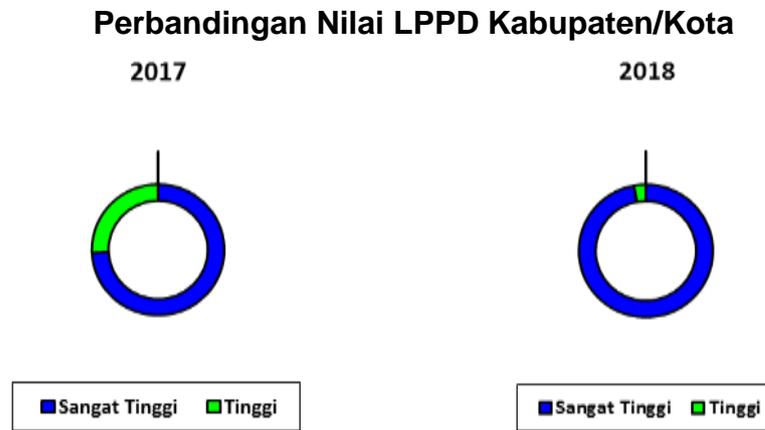
Tabel III.6
Capaian Indikator Sasaran 4

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2019	Realisasi 2019	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2019 Atas Target Renstra
Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100%	100%	-	100% (tahunan)

Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah tercapai 100%. Hal ini ditunjang oleh program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah dan Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD, serta Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Dicapainya target indicator sasaran ini dilihat dari ketercapaian 100% IKK penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah, difasilitasinya seluruh administrasi Kepala Daerah dan DPRD sesuai jadwal, serta pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan.

Pada tahun 2019, 35 Kabupaten/Kota telah menyusun dan menyerahkan LPPD Tahun 2018 dengan hasil kualifikasi

nilai Sangat Tinggi bagi 34 Kabupaten/Kota dan nilai Tinggi bagi 1 Kabupaten/Kota.



Hasil ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu nilai Sangat Tinggi bagi 26 Kabupaten/Kota dan nilai Tinggi bagi 9 Kabupaten/Kota. LPPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 telah disusun dan disampaikan tepat waktu kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada bulan Maret Tahun 2019. Informasi LPPD telah disampaikan kepada masyarakat melalui Harian Jawa Pos Radar Semarang tanggal 5 Desember 2019.

Gambar 7



ILPPD Provinsi Jawa Tengah

Dalam upaya penertiban administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pada tahun 2019 Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Dan Kerjasama memfasilitasi 5 dokumen administrasi Kepala Daerah, 6 Keputusan PAW, 35 Keputusan Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota, 35 Keputusan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dan 35 Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota serta fasilitasi 2 masalah Kepala Daerah.

Gambar 8



Pelantikan Kepala Daerah

Penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai indikator sasaran 4 sebesar Rp.3.318.865.021 atau 98,78% dari total pagu Rp.3.359.969.000. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,22% atau sebesar Rp.41.103.979.

Terhadap target tahun 2019, rata-rata capaian indikator kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama adalah 104,5%. Capaian ini meningkat 7,82% dari tahun 2018 sebesar 96,68%. Peningkatan ini ditunjang oleh proses perencanaan dengan memperhatikan evaluasi kegiatan sebelumnya serta proses pengendalian internal. Lonjakan capaian kinerja tahun 2019 sebesar 4,5% (realisasi 104,5% dari target 100%) merupakan kontribusi dari keberhasilan pencapaian kinerja atas realisasi hasil rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan dan efektifitas kerjasama.

2. Target Dan Realisasi Jangka Menengah

Target dan realisasi dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama sebagai berikut :

Tabel III.11
Target Dan Realisasi Renstra 2018-2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET s.d. 2019	REALISASI s.d. 2019	% CAPAIAN THD TARGET RENSTRA
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	1. Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85%	100%	117%
	2. Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	70%	71%	83%
Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3. Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100%	100%	100%
	4. Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100%	100%	100%

Setiap indikator sasaran memiliki sifat penghitungan yang berbeda, indikator 1, 3, dan 4 merupakan target tahunan yang bersifat pengulangan, sedangkan indikator 2 bersifat progres positif dalam jangka waktu 5 tahun.

Terdapat 1 indikator yang merupakan kinerja dari Biro Umum yaitu Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pelayanan

Umum, Keprotokolan Dan Kehumasan, untuk itu indikator tersebut tidak dijabarkan dalam LKjIP ini.

B. REALISASI ANGGARAN

- 1) Pencapaian indikator sasaran **1 (Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi)** menggunakan anggaran sebesar Rp53.775.000 dari alokasi anggaran senilai Rp73.751.000, terdapat efisiensi sebesar 27,09%.
- 2) Pencapaian indikator sasaran **2 (Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif)** menggunakan anggaran senilai Rp2.701.356.860 dari alokasi anggaran Rp2.738.088.000, terdapat efisiensi sebesar 1,34%.
- 3) Pencapaian indikator sasaran **3 (Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota)** menggunakan anggaran senilai Rp1.514.572.638 dari alokasi anggaran senilai Rp1.536.299.000, terdapat efisiensi sebesar 1,41%.
- 4) Pencapaian indikator sasaran **4 (Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD)** menggunakan anggaran sebesar Rp3.318.865.021 atau 98,78% dari total pagu Rp3.359.969.000. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 1,22% atau sebesar Rp41.103.979.
- 5) Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah dengan indikator Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Pelayanan Umum, Keprotokolan Dan Kehumasan yang dijalankan oleh Biro Umum, Biro Pemerintahan

Otonomi Daerah Dan Kerjasama menjalankan Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah dengan menggunakan anggaran sebesar Rp781.352.234 dari alokasi anggaran Rp791.893.000 dan terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp10.540.766 atau 1,33%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran atas pencapaian 4 indikator sasaran dan 1 program pendukung pada tahun 2019 sebesar **Rp8.369.921.753,- (98,47%)**. Capaian realisasi anggaran ini meningkat 4,51% dari tahun 2018 sebesar 93,96%. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan pada perencanaan dan pengendalian internal yang dilaksanakan secara intensif.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian indikator kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 104,5% (meningkat 7,82% dari tahun 2018 sebesar 96,68%), maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama dikategorikan pencapaian kerjanya **SANGAT BAIK** sebagaimana olah data berikut :

1. Hasil pengukuran capaian indikator sasaran **Sangat Baik (104,5%)** dengan rincian :
 - a) **Indikator Sasaran 1** dicapai 117% atau **Sangat Baik**.
 - b) **Indikator Sasaran 2** dicapai 101% atau **Sangat Baik**.
 - c) **Indikator Sasaran 3** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
 - d) **Indikator Sasaran 4** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.

2. Hasil capaian realisasi anggaran **Baik (98,47%)** dengan rincian :
 - a) **Indikator Sasaran 1** dicapai 72,91% atau **Cukup Baik**.
 - b) **Indikator Sasaran 2** dicapai 98,66% atau **Sangat Baik**.
 - c) **Indikator Sasaran 3** dicapai 98,59% atau **Sangat Baik**.
 - d) **Indikator Sasaran 4** dicapai 98,78% atau **Sangat Baik**.
 - e) **Program Pendukung** dicapai 98,67% atau **Sangat Baik**.

B. SARAN

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama akan lebih mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kinerja.

